

COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM MUSYAWARAH RENCANA PEMBANGUNAN (MUSRENBANG) TINGKAT RT/RW (Studi Kasus di RW 2 Kelurahan Tidar Selatan Kota Magelang)

**Eva Nur Habibah¹, Rizqiyatu Zuthfiyah², Fitriyati³, Fajar Rachmad⁴, Arini Listianingrum⁵
RM. Mahendradi**

^{1,2,3,4,5}Universitas Tidar; Jalan Kapten Suparman 39 Magelang 56116, telp: (0293)364113/ fax: (0293)362438

e-mail: ¹eva.vaa99@gmail.com ²rizqiyatu.zuthfiyah99@gmail.com , ³Fiyat13@gmail.com ,
⁴fajarrachmadhandoko@gmail.com, ⁵arinitia14@gmail.com

ABSTRAK

Perencanaan Pembangunan berkaitan erat dengan musrenbang (musyawarah perencanaan pembangunan). Hal ini dikarenakan partisipasi masyarakat menentukan tepat atau tidaknya perencanaan yang dibuat. Karena perkembangan perencanaan partisipatif bermula dari kesadaran bahwa kinerja sebuah prakarsa sangat ditentukan oleh semua pihak yang terkait dengan prakarsa tersebut. Penelitian ini berkaitan dengan bagaimana collaborative governance dalam musyawarah rencana pembangunan di RW 2 Tidar Selatan yang berada didekat lingkungan kelurahan Tidar Selatan akan tetapi masyarakatnya masih belum memiliki kesadaran dan kurang berpartisipasi aktif dalam mewujudkan tujuan pembangunan daerah untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi collaborative governance dalam musyawarah rencana pembangunan di RW 2 Tidar Selatan dan partisipasi masyarakatnya dalam musrenbang yang diadakan setiap tahunnya. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah deskriptif kualitatif dengan menggunakan data primer dari hasil observasi dan wawancara serta data sekunder dari hasil studi literatur dengan menelaah beberapa jurnal yang berkaitan dengan perencanaan pembangunan dan musrenbang.. Hasil dari penelitian ini Collaborative governance dalam musyawarah pembangunan belum terjadi di RT/RW 2 kelurahan Tidar Selatan, hal ini karena berdasarkan hasil penelitian, masih kurangnya partisipasi warga secara menyeluruh, usulan pembangunan masih berupa pembangunan fisik, kurangnya komitmen dan semangat dari para pemimpin (pemerintah, Ketua RW, Ketua RT) dalam merencanakan pembangunan yang berorientasi pada kesejahteraan bersama, mengatasi kemiskinan, dan pemberdayaan warga. Selain itu partisipasi warga yang rendah juga menjadikan perencanaan pembangunan hanya sebatas pelaksanaan program dari pemerintah karena warga menganggap bahwa perencanaan pembangunan adalah tugas dari para pengurus RT dan RW. Perlu adanya perbaikan pada struktur dan pengembangan lembaga yang sudah ada (PKK dan Karang Taruna), serta sosialisasi dan bimbingan teknis dari pemerintah daerah/kota.

Kata kunci: Perencanaan pembangunan; Collaborative governance; Partisipasi Masyarakat

1. PENDAHULUAN

Perencanaan pembangunan merupakan proses pengembangan kapasitas masyarakat dalam jangka panjang yang memerlukan

perencanaan tepat dan akurat. Perencanaan harus mampu mencakup kapan, dimana, dan bagaimana pembangunan harus dilakukan agar mampu mendorong pertumbuhan

ekonomi dan sosial secara berkesinambungan. Setiap pemerintah daerah memiliki kewenangan dalam perencanaan, pengelolaan anggaran, dan pelaksanaan pembangunan daerahnya sehingga perencanaan pembangunan daerah dapat dikatakan bersifat desentralisasi.

Sistem perencanaan pembangunan nasional di Indonesia menggunakan dua pendekatan, *top down* dan *bottom up* untuk menjamin keseimbangan antara prioritas nasional dan aspirasi dari masyarakat daerah. Pendekatan *top down* merupakan perencanaan pembangunan dengan segala keputusan penting dan jenis kegiatannya telah ditentukan oleh pemerintah sehingga masyarakat bersifat pasif. Sedangkan pendekatan *bottom up* merupakan pendekatan yang dibangun atas dasar pengelolaan sumber daya manusia. Persoalan ataupun aspirasi masyarakat selalu menjadi pertimbangan dalam setiap kebijakan yang akan diambil. Masyarakat memiliki peranan dalam setiap pembangunan untuk mengusulkan sesuatu yang sesuai dengan kebutuhannya. Dengan begitu masyarakat ikut serta di setiap program-program pembangunan. (Supeno, 2005:2-3 dalam Azhar. 2015)[1].

Musrenbang telah diatur dalam Permendagri No 86 Tahun 2017[2] mengenai tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah yang meliputi

RPJPD, RPJMD, Renstra OPD, RKPD, dan Renja OPD menjadi pijakan formal penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah. Melalui forum yang dilaksanakan oleh pemegang kepentingan mulai dari tingkat Desa/Kelurahan, Kabupaten/Kota hingga provinsi. Dalam pelaksanaan musrenbang ini masyarakat terlibat bukan hanya untuk mendukung kebijakan pemerintah namun juga dalam menentukan arah strategi kebijakan, menikmati hasil serta manfaat yang diperoleh serta memikul bersama dalam proses pelaksanaannya.

Kota Magelang merupakan kota kecil yang berada di Provinsi Jawa Tengah luas wilayah 18,54km² dengan memiliki 17 kelurahan rata-rata luasnya tidak lebih dari 2 km². Kelurahan Tidar selatan merupakan salah satu kelurahan dengan pencapaian program pembangunan infrastruktur yang memerlukan upaya keras untuk mewujudkannya karena baru 0,4Ha yang berarti <80% dari target 2017 atau target RPJMD seperti gambar 1.1.

14. Program Pembangunan Infrastruktur Kelurahan Rejowinangun Selatan	14. Luas kawasan kumuh (ha)	6,71	0 Ha	2 Ha	2,81 Ha	09,14%	14,02%	100%	■
						70,19%	58,12%	83%	■
15. Program Pembangunan Infrastruktur Kelurahan Rejowinangun Utara	15. Luas kawasan kumuh (ha)	13,62	0 Ha	5 Ha	10,90 Ha	63,29%	20,91%	31,61%	■
16. Program Pembangunan Infrastruktur Kelurahan Tidar Selatan	16. Luas kawasan kumuh (ha)	11,98	0 Ha	4 Ha	0,40 Ha				■
17. Program Pembangunan Infrastruktur Kelurahan Tidar Utara	17. Luas kawasan kumuh (ha)	8,46	0 Ha	3 Ha	4,46 Ha				■
18. Program Pembangunan Infrastruktur Kelurahan Wates	18. Luas kawasan kumuh (ha)	6,6	0 Ha	2 Ha	4,37 Ha	64,54%	47,26%	73,22%	■
19. Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah	19. Penertase penduduk berakses air minum	100%	92,30%	33,79%	87,88%	48,48%	95%		■

*Gambar 1.1 Target dan Realisasi Indikator
Kinerja Urusan Perumahan dan Kawasan
Permukiman*

Sumber : RKPD Kota Magelang .2019[3]

Dalam musrenbang ini diharapkan perencanaan pembangunan daerah dapat sesuai dengan kebutuhan masyarakat sehingga dapat mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat sesuai tujuan yang diharapkan oleh pemerintah. Akan tetapi, berdasarkan penelitian awal lapangan menunjukkan masyarakat kurang memahami esensi tersebut, seperti yang terjadi di RW 2 Kelurahan Tidar Selatan, yang terjadi adalah kurangnya keterlibatan aktif masyarakat terlihat dari hanya beberapa warga saja yang menghadiri kegiatan pertemuan rutin bulanan RT membahas mengenai usulan rencana pembangunan, kurangnya peran aktif antara pemangku kepentingan, dalam hal ini adalah pengurus RT/RW, pemerintah kota, dan swasta. Padahal untuk mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan dan inovatif dibutuhkan kolaborasi yang kuat antara pemerintah, swasta dan masyarakat.

Partisipasi masyarakat adalah keikutsertaan masyarakat tersebut dalam proses mengidentifikasi masalah dan potensi yang ada di masyarakat, pemilihan dan pengambilan keputusan tentang alternatif solusi untuk menangani masalah, pelaksanaan upaya mengatasi masalah, dan keterlibatan masyarakat dalam proses mengevaluasi perubahan yang

terjadi(Isbandi.2007)[4] Lebih lanjut Bryant and White menyatakan bahwa partisipasi masyarakat didorong melalui (1) proyek pembangunan bagi masyarakat desa yang dirancang sederhana dan mudah dikelola oleh masyarakat; (2) organisasi dan lembaga kemasyarakatan yang mampu menggerakkan dan menyalurkan aspirasi masyarakat; dan (3) peningkatan peranan masyarakat dalam pembangunan (Rahayu, 2008: 6 dalam Ashari dkk. 2015:168)[5]

Menurut Ansell dan Gash (2007:543) *collaborative Governance* sebagai sebuah strategi baru dalam tata kelola pemerintahan dengan melibatkan secara langsung aktor non pemerintahan dalam sebuah proses pembuatan kebijakan kolektif yang bersifat formal, berorientasi konsensus dan konsultatif dengan tujuan membuat atau mengimplementasikan kebijakan publik serta mengelola aset publik.[6] Begitupun dengan Donahue dan Zeckhauser mengartikan “*collaborative governance can be thought of a form of agency relationship between government as principal, and private players as agent.*” (Donahue dan Richard, 2011:30) Artinya bahwa pemerintahan kolaboratif dapat dianggap sebagai suatu bentuk hubungan kerja sama antara pemerintah sebagai regulator dan pihak swasta sebagai pelaksana(Irawan.2017:6)[7]

Collaborative Governance diartikan sebagai sebuah pengaturan yang dilakukan

atas hasil kerjasama pemerintah dengan terdapat masyarakat dan komunitas sosial atau dapat disebut dengan *multipartner governance* dalam rangka mencapai tujuan bersama. (Agrawal dan Lemos dalam Emerson, dkk, 2011:3;)¹[8] Terkait dengan masalah musrenbang di RW 2 Kelurahan Tidar Selatan yang dinilai masih kurang melibatkan partisipasi aktif antar pemangku kepentingan perlu dilakukan *collaborative governance* atau tata kelola pemerintahan yang kolaboratif dalam melakukan perencanaan pembangunan di RW 2 Tidar Selatan. Untuk tercapainya keberhasilan pembangunan masyarakat daerah maka segala program perencanaan, pelaksanaan serta evaluasi pembangunan harus melibatkan antar pemangku kepentingan, terutama warga sekitar, karena merekalah yang mengetahui permasalahan dan kebutuhan dalam rangka membangun wilayahnya sebab mereka nantinya yang akan memanfaatkan dan menilai tentang berhasil atau tidaknya pembangunan di wilayah mereka. Adapun dimensi *Collaborative Governance* menurut Emerson dkk dalam Febrian (2016:203)[9] memiliki tiga dimensi, yaitu:

1. *system context/* kotak terluar yang merupakan ruang lingkup. Dimensi ini memiliki 7 elemen yaitu:

- a. *Resouce Condition* (Sumber daya yang dimiliki)
 - b. *Policy and Legal Framework* (Kebijakan dan kerangka hukum),
 - c. *Level of Conflict/Trust* (Konflik antar kepentingan dan tingkat kepercayaan)
 - d. Sosio-ekonomi; kesehatan; budaya; dan ragam (Potret Kondisi),
 - e. *Prior failure to Address Issues* (Kegagalan yang ditemui di awal),
2. *Drivers* terkait dengan aspek kepemimpinan, kondisi intern dan ekstern, kondisi ketika organisasi tersebut tidak dapat mencapai tujuan serta tantangan utama dalam mengelola masalah publik. Dimensi kedua ini memiliki 4 komponen yaitu:
 - a. *Leadership*, mengacu pada sosok pemimpin yang dapat berinisiatif untuk memulai dan membantu mempersiapkan sumberdaya.
 - b. *Consequential incentives*, mengarah pada bagian baik internal (masalah sumberdaya, kepentingan, atau kesempatan), maupun eksternal (krisis, ancaman, kesempatan situasional/institusional).
 - c. *Interdependence*, kondisi ketika individu dan organisasi tidak dapat mencapai sesuatu dengan usaha dan kapasitas satu pihak.
 - d. *Uncertainty*, ketidak pastian menjadi tantangan utama dalam mengelola permasalahan publik.

¹ Emerson, dkk. 2011. An Integrative Framework for Collaborative Governance, *Journal of Public Administration Research and Theory*

3. Dimensi ketiga merupakan dinamika kolaborasi yang terdiri atas tiga komponen, yaitu : *Principled Engagement, Shared Motivation, Capacity for Join action.*

Tulisan ini mencoba menganalisis potensi pembangunan kawasan di RW 2 kelurahan Tidar selatan berbasis *Collaborative Governance* dalam mewujudkan musyawarah rencana pembangunan tingkat RT/RW untuk mencapai kesejahteraan masyarakat sesuai tujuan pembangunan nasional.

2. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif. Metode penelitian deskriptif ini menurut Sugiyono, yaitu: “Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih (independen) tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan antara variabel satu dengan variabel lain.” (Sugiyono, 2007:11).[10]

Penulis menggunakan data primer dari hasil wawancara dan sekunder melalui pendekatan *literatur review* serta mengangkat berbagai karya ilmiah yang terkait dengan topik yang diangkat. Secara umum *literatur review* adalah mengidentifikasi, menilai dan menginterpretasi seluruh temuan-temuan pada suatu topik penelitian untuk menjawab

pertanyaan penelitian yang telah ditetapkan sebelumnya. (Kitchenham & Charters. 2007)

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

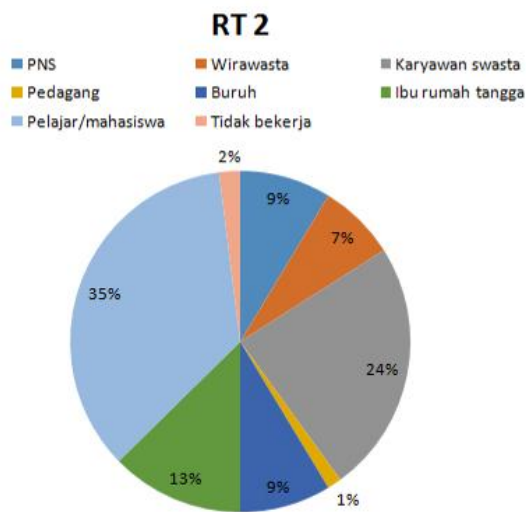
3.1 Gambaran umum kondisi daerah

Gambaran umum kondisi daerah ini untuk menggambarkan potret kondisi sosio ekonomi masyarakat, pendidikan, budaya dan sumber daya yang dimiliki oleh Rukun Warga (RW) 2 Kelurahan Tidar Selatan. Dari gambaran ini, nantinya dapat memudahkan untuk melihat potensi yang ada.

RW 2 Kelurahan Tidar Selatan merupakan wilayah yang berada di Kecamatan Magelang Selatan Kota Magelang dengan luas kelurahan sebesar 1,27 km². Wilayah RW 2 berada di ibu kota kelurahan dan termasuk wilayah yang dekat dengan jarak kota, yaitu kurang dari satu jam, sehingga secara topologi termasuk dalam wilayah dataran rendah. Secara umum sebagian besar warga RW 2 bekerja sebagai karyawan swasta. Komposisi warga RW 2 cukup bervariasi. Berikut komposisi warga RW 2 berdasarkan data yang telah peneliti peroleh di lapangan.

a. Berdasarkan pekerjaan

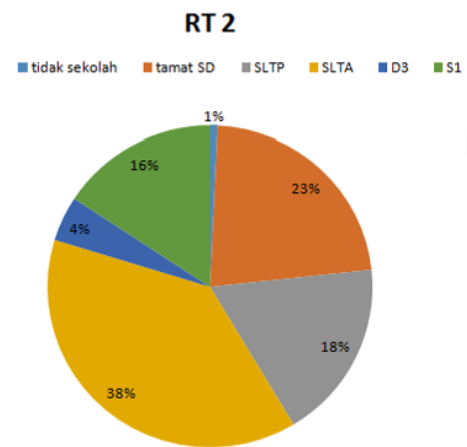
Sebagian besar warga RW 2 masih dalam pendidikan baik sebagai pelajar maupun mahasiswa dan juga banyak dari warga RW 2 bekerja sebagai karyawan swasta. Berikut merupakan persentase jenis pekerjaan yang ada di RW 2.



Gambar 3.1.a Data Pekerjaan RT 2

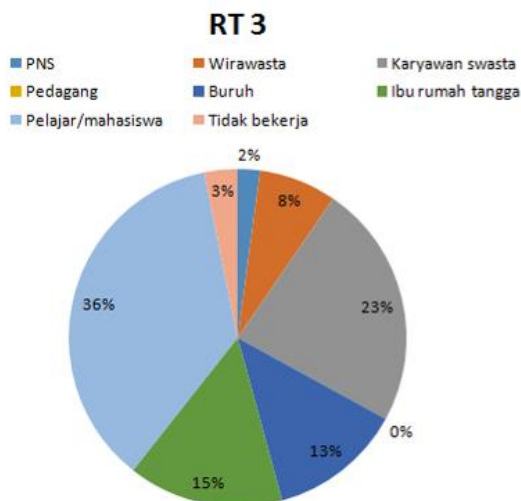
Sumber : Penulis. 2019

pendidikan warga RW 2 dapat dilihat berdasarkan gambar berikut:



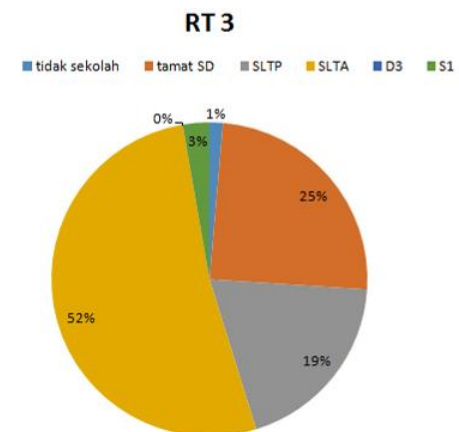
Gambar 3.1.b Pendidikan Warga RT 2

Sumber : Penulis. 2019



Gambar 3.1.a Data Pekerjaan RT 3

Sumber : Penulis. 2019



Gambar 3.1.b Pendidikan Warga RT 3

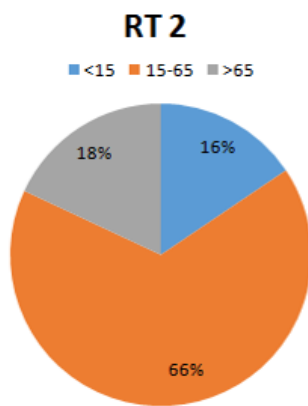
Sumber : Penulis. 2019

b. Berdasarkan tingkat pendidikan

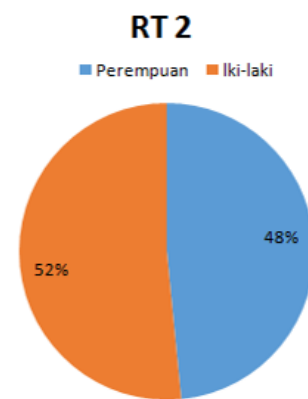
Sebagian besar warga RW 2 adalah tamatan SLTA/SMA. Terdapat perbedaan terkait tingkat pendidikan yang ditempuh antara RT 2 dan RT 3 RW 2 Kelurahan Tiar selatan ini, dimana tingkat pendidikan RT 2 lebih beragam daripada RT 3. Tingkat

c. Berdasarkan usia

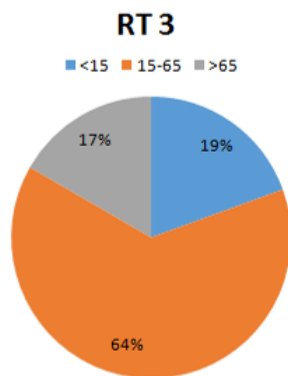
Berdasarkan usia, warga RW 2 didominasi oleh usia produktif yaitu usia antara 15-65 tahun, dengan jumlah RT 2 sebanyak 107 dari 161 warga, dan RT 3 sebanyak 69 dari 108 warga. Berikut persentase perbandingan usia antara warga RT 2 dan RT 3:



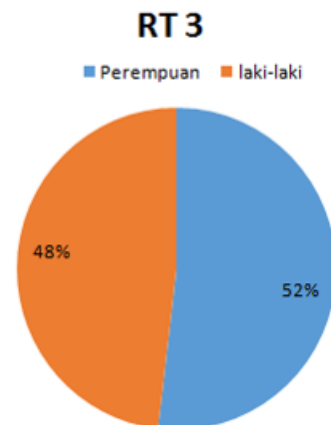
Gambar 3.1.c Komposisi Usia Warga RT 2
Sumber : Penulis. 2019



Gambar 3.1.d Gender Warga RT 2
Sumber : Penulis. 2019



Gambar 3.1.c Komposisi Usia Warga RT 3
Sumber : Penulis. 2019



Gambar 3.1.d Gender Warga RT 3
Sumber : Penulis. 2019

d. Berdasarkan gender

Tidak ada kesenjangan jumlah antara perempuan dan laki-laki baik warga RT 2 maupun RT 3. Namun jumlah laki-laki lebih banyak daripada perempuan di RT 2 sedangkan RT 3 perempuan lebih banyak hampir sama dengan jumlah laki-laki.

3.2 Musyawarah RT/RW

Pelaksanaan muasyawarah antar RT dengan RW maupun antara RT dengan warga masih dilaksanakan secara manual, tidak atau belum ada pemanfaatan teknologi informasi (*e-government*), selain itu tidak tersedia balai RW/RT karena keterbatasan lahan sehingga untuk pelaksanaan musyawarah, dilakukan dengan memanfaatkan rumah warga secara bergantian. Berikut Pelaksanaan

musyawarah rencana pembangunan RT/RW
2 Kelurahan Tidar Selatan:

a. Musyawarah RT

Jumlah pengurus RT	Jumlah pengurus inti RT 2 dan RT 3 berjumlah lima orang. terdiri dari: ketua, sekretaris, bendahara, sie.keamanan, dan sie.pembangunan. Tidak ada struktur kepengurusan secara formal/tertulis hanya berdasarkan kesepakatan bersama.
Tingkat pendidikan pengurus RT	Tingkat pendidikan paling tinggi adalah SLTA. Para pengurus RT adalah mereka yang dalam usia lanjut sehingga kurang dalam berpikiran inovatif.
Peraturan RT	RT tidak mengeluarkan peraturan apapun.
Bimbingan teknis dari pemerintah yang lebih tinggi	Jarang sekali ada bimbingan teknis. Hanya ada bimtek mengenai pemeliharaan umum saja
Kuangan RT	Tidak ada bantuan pihak ke tiga/pemkot atau lainnya yang sah. Urusan bersama yang membutuhkan dana dilakukan secara sukarela oleh warga dengan cara iuran (terdapat program

	rutin yatu jimpitan sebesar yang terdapat disetiap rumah warga sebesar Rp.1000,- setiap minggu.
Akuntabilitas, pembinaan, dan pengawasan	Tidak ada laporan terkait penggunaan dana kepada pihak atasan (RW) RT diberikan hak otonom dalam penggunaan dana. Tidak ada buku khusus terkait administrasi. Hanya terdapat satu buku notulensi yang dipegang oleh ketua RT (RT 2). Sementara ketua RT 3 tidak ada sama sekali.

Dari tabel tersebut dapat disimpulkan bila kepengurusan tiap-tiap RT yang ada di RW 2 ini dikelola langsung hanya oleh warga dengan hanya ada bimbingan teknis dari pemerintah kota terkait pemeliharaan umum, padahal bimbingan teknis bagi pengembangan pengurus RT/RW ini sangat berguna bagi pembangunan di daerah tersebut. Karena adanya pengarahan langsung terkait dengan kepengurusan meski hanya tingkat RT pun akan sangat berpengaruh terhadap berkembangnya daerah itu sendiri, dengan memberikan berbagai inovasi-inovasi baru yang akan lebih mendorong warganya pula untuk berpartisipasi aktif dalam memajukan daerahnya sendiri.

b. Aktivitas masyarakat

Terdapat karang taruna yang beranggotakan para pemuda warga RW 2. Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan, karang taruna telah merencanakan program baru yaitu melestarikan kesenian jatilan yang juga sebagai sarana dalam menyalurkan bakat dan hobi para pemuda warga RW 2. Selain karang taruna terdapat PKK yang beranggotakan ibu-ibu warga RW 2.

Terdapat *home industry* berupa kerupuk dan selondok yang dijalankan perorangan oleh warga RT 3 RW 2 Kelurahan Tidar Selatan Kota Magelang. Home industry merupakan salah satu inovasi yang dapat dimanfaatkan guna mendorong perekonomian di lingkungan masyarakat. dalam musrenbang sendiri dilaksanakan untuk mengetahui potensi daerah serta membuka peluang bagi masyarakat untuk mengembangkan kewirausahaan bagi masyarakat desa.

3.3 Collaborative Governance dalam Musrenbang RW

a. System context

Konteks system dalam kajian ini direpresentasikan sebagai kondisi awal yang terdiri dari sumber daya yang membutuhkan perbaikan atau peningkatan, peraturan yang dibuat oleh RT/RW, administrasi dan potensi pemberdayaan. Berdasarkan hal-hal

tersebut, kondisi yang terjadi adalah RW 2 telah memiliki sumber daya manusia yang produktif yaitu dominasi warga adalah usia produktif 15-65 tahun dengan jumlah 226 orang dari jumlah keseluruhan warga kurang lebih 269 orang, dan telah terdapat Karang Taruna dan PKK. Namun yang terjadi lembaga-lembaga tersebut kurang bermanfaat dan kurang aktif dalam membuat dan melaksanakan program-program pembangunan. Selain potensi tersebut terdapat potensi lainnya yaitu, terdapat *home industry* berupa produksi kerupuk dan selondok yang dijalankan oleh perorangan atau secara mandiri. Padahal berdasarkan potensi sumberdaya tersebut dapat dilakukan pemberdayaan dengan melibatkan karang taruna maupun PKK serta pihak ketiga sebagai penyedia modal dan distribusi produk. Yang dapat dilakukan adalah membuat atau memperkuat kelembagaan yang telah tercipta, perlu membentuk struktur formal kepengurusan dan pengadaan program rutin. Secara struktural dan administrasi, baik pengurus RW maupun lembaga PKK maupun karang taruna belum ada administrasi secara baik, formal dan terarah. Dimana karang taruna terbentuk namun tak ada struktur yang jelas, akan tetapi hanya “terlihat” kinerjanya ketika ada perlombaan ataupun perayaan hari besar. Menurut narasumber, mengatakan bila karang taruna ini kurang terkoordinasi

dengan baik karena kesibukan dari pemuda sendiri dimana kebanyakan masih sekolah serta kurangnya program-program tahunan yang direncanakan karena sumber biaya masih dihasilkan dari hasil iuran warga.

Policy and Legal Framework kebijakan atau kerangka hukum dalam Musrenbang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dalam pasal 1 ayat 21 dinyatakan bahwa Musrenbang adalah forum antar pelaku dalam rangka menyusun rencana pembangunan nasional dan pembangunan daerah. Pelaksanaan Musrenbang diawali dengan musyawarah masyarakat tingkat RT/RW yang dipelopori oleh Kelurahan sebagai fasilitator dalam menentukan prioritas pembangunan diwilayahnya, baru nantinya hasil musyawarah ke musrenbang Kecamatan dan seterusnya. Sehingga dapat dikatakan peran serta dari RT dan RW ini amat vital sebagai lembaga kemasyarakatan yang berhubungan dengan masyarakat memiliki fungsi sebagai penyampai kebijakan. Inilah yang kemudian menunjukkan *Prior failure to Address Issues* dalam langkah awal *collaborative governance*. Apabila masyarakat kurang berpartisipasi aktif dalam tahapan musrenbang ini nantinya akan menimbulkan *Level of*

Conflict/Trust, hal ini terjadi dikarenakan masyarakat tidak ikut serta menyampaikan masukannya yang nantinya akan membuat seolah-olah pemerintah tidak mendengarkan aspirasinya, atau kebijakan yang dibuat tidak sesuai dengan harapan dari masyarakat.

Dari kondisi Sosio-ekonomi;kesehatan;budaya;dan ragam yang telah disampaikan pada gambaran umum menunjukkan bila kondisi di RW 2 didominasi oleh Karyawan Swasta dimana masyarakat sebagian besar bukan orang asli Kelurahan Tidar Selatan(hasil wawancara dengan RT 2).

b. Drivers

Drivers sebagai komponen *collaborative governance*, elemen yang paling berpengaruh adalah *leadership*. Perencanaan pembangunan selain juga keterlibatan masyarakat secara aktif, para pemimpin harus mampu mendorong masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam perencanaan pembangunan. Oleh karena itu mulai dari pemerintah kota harus mempunyai komitmen kuat dalam melakukan pembangunan berkelanjutan dan terarah melalui peraturan dan pengawasan. Yang terjadi disini adalah kurangnya sosialisai terkait peraturan perencanaan pembangunan sampai dengan tingkat RT selain itu juga tidak ada bimbingan teknis mengenai perencanaan pembangunan dan pemberdayaan kepada

RT ataupun warga sehingga warga kurang informasi mengenai pembangunan dan pemberdayaan yang kemudian membuat warga menjadi pasif dan hanya melakukan program yang diberikan pemerintah jika ada. Hal yang terjadi ini menunjukkan adanya *interdependence*, yaitu kondisi ketika individu dan organisasi tidak dapat mencapai sesuatu dengan usaha dan kapasitas satu pihak.

c. Dinamika kolaborasi

Dinamika kolaborasi merupakan pendorong penting dalam memberi energi atau mendorong penyelenggaraan yang bersinergi antara pemerintah dengan masyarakat. pada dinamika kolaborasi ini terdapat tiga komponen interaksi dinamika kolaborasi yaitu keterlibatan berprinsip, motivasi bersama dan kapasitas untuk aksi bersama.

Keterlibatan berprinsip terjadi dari waktu ke waktu dan dapat mencakup pemangku kepentingan (Pengurus RW, Pemerintah kelurahan dan warga) yang memiliki konten berbeda, tujuan relasional dan yuridiksi masing-masing saling berinteraksi dalam sebuah pertemuan tatap muka (musyawarah) untuk menyelesaikan konflik atau menciptakan sebuah gagasan baru. Dalam keterlibatan berprinsip memiliki 4 elemen proses yaitu penemuan, definisi, musyawarah dan tekad (Emerson. 2011:7)[8] Melalui proses berulang ini

akan mengembangkan rasa untuk mencapai tujuan bersama dan membangun hubungan baik memahami antar orang dalam kelompok mengenai masalah atau tantangan yang dihadapi serta skala kegiatan yang disepakati bersama.

Komponen kedua ialah motivasi bersama yang berarti menguatkan diri dalam hal percaya, pemahaman, legitimasi internal dan komitmen yang dibangun oleh masyarakat, pemerintah maupun komunitas yang ada, dalam pencapaian pemerintah yang kolaboratif. Pada praktik yang terjadi masyarakat memiliki rasa percaya terhadap pemimpinnya dalam hal ini ketua RT maupun RW dalam mengurus lingkungannya, mampu mempertahankan gotong royong di lingkungannya terbukti dengan adanya kerjasama antar warga dalam setiap kegiatan misal bersih-bersih daerah lingkungan, diagendakan tiap bulan. Namun yang menjadi pertanyaan mengapa kemudian masyarakat memiliki partisipasi kurang aktif dalam setiap pelaksanaan musyawarah. Bisa saja hal ini dikarenakan belum terbangun pemahaman dalam diri masyarakat sendiri untuk berperan aktif dalam memberikan pendapatnya. Sehingga diperlukan peran aktif dari pemimpin tokoh-tokoh masyarakat ataupun antar warga untuk menumbuhkan pemahaman akan pentingnya partisipasi aktif dalam musrenbang.

Interaksi yang berulang dan berkualitas melalui keterlibatan berprinsip akan membantu menumbuhkan rasa percaya, saling pengertian dan komitmen bersama sehingga dapat menghasilkan dan motivasi bersama untuk mencapai perencanaan pembangunan yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Komponen ketiga ialah *Capacity for Join action*, tujuan dari kolaborasi adalah menghasilkan hasil/tujuan yang diinginkan bersama yang tidak dapat dicapai secara terpisah. Adanya kolaborasi maka sumber daya akan saling diuntungkan, karena memunculkan kemungkinan untuk berbagi dan saling memanfaatkan. jika dilihat berdasarkan kondisi yang terjadi maka musrenbang telah dilaksanakan baru sampai dengan tingkat RT (pada waktu bulan Desember 2019). Namun yang terjadi disini partisipasi musrenbang masih kurang, karena usulan-usulan pembangunan dilaksanakan oleh laki-laki. Seharusnya usulan dapat digali dari semua unsur warga baik laki-laki maupun perempuan. Selain itu, dapat pula digali melalui komunitas lain yang ada seperti PKK dan karang taruna serta komunitas *home industry*.

d. SIMPULAN

Collaborative governance dalam musyawarah pembangunan belum terjadi di

RT/RW 2 kelurahan Tidar Selatan, hal ini karena berdasarkan hasil penelitian, masih kurangnya partisipasi warga secara menyeluruh, usulan pembangunan masih berupa pembangunan fisik, kurangnya komitmen dan semangat dari para pemimpin (pemerintah, Ketua RW, Ketua RT) dalam merencanakan pembangunan yang berorientasi pada kesejahteraan bersama, mengatasi kemiskinan, dan pemberdayaan warga. Selain itu partisipasi warga yang rendah juga menjadikan perencanaan pembangunan hanya sebatas pelaksanaan program dari pemerintah karena warga menganggap bahwa perencanaan pembangunan adalah tugas dari para pengurus RT dan RW.

Perlu adanya perbaikan dalam struktur dan pengembangan lembaga yang sudah ada (PKK dan Karang Taruna), serta sosialisasi dan bimbingan teknis dari pemerintah daerah/kota. Pengembangan dan pemberdayaan karang taruna dan PKK dapat dilakukan dengan cara penyuluhan, pelatihan dan pendampingan. Pelatihan dan penyuluhan dapat dilakukan dengan orientasi pada pemenuhan dimensi kognitif, afektif dan psikomotor. Contoh materi penyuluhan bagi karang taruna dapat digunakan mengenai peran generasi muda dalam membangun desa, internet positif dan pemanfaatannya, kewirausahaan dan kisah sukses, kepemimpinan dan keorganisasian. Pelatihan usaha dapat dilakukan bagi PKK

dan karang taruna diantaranya budidaya tanaman di rumah, pelatihan keterampilan kerajinan serta dapat dilakukan kerjasama dengan *home industry* setempat untuk pendampingan kerja dimana PKK ataupun karang taruna sebagai agen dalam pemasaran.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Azhar, Fikri. 2015. Partisipasi Masyarakat Dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (MUSRENBANG) di Kelurahan Pegirian Kecamatan Semampir Kota Surabaya. *Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik* Vol. 3 No 2
- [2] Peraturan Menteri Dalam Negeri No 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
- [3] Peraturan Walikota No 31 Tahun 2018 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Kota Magelang Tahun 2019
- [4] Isbandi. 2007. Perencanaan Partisipatoris Berbasis Aset Komunitas: dari Pemikiran Menuju Penerapan. Depok: FISIP UI Press
- [5] Ashari, Masjudi, Wahyunadi dan Hailuddin. 2015. Analisis Perencanaan Pembangunan Daerah Di Kabupaten Lombok Utara (Studi Kasus Perencanaan Partisipatif Tahun 2009-2013). *Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik*, Vol. 6, No. 2,
- [6] Ansell, Chris & Alison Gash. 2007. Collaborative Governance in Theory and Practice. *Journal of Public Administration Research and Theory* Vol 18 No 4 Hlm 543-571
- [7] Irawan,Denny. 2017. COLLABORATIVE GOVERNANCE (Studi Deskriptif Proses Pemerintahan Kolaboratif Dalam Pengendalian Pencemaran Udara di Kota Surabaya). *Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik* Volume 5 No 3
- [8] Emerson Kirk, Tina Nabatchi, Stephen Balogh. 2011. An Integrative Framework for Collaborative Governance, *Journal of Public Administration Research and Theory* <https://doi.org/10.1093/jopart/mur011>
- [9] Febrian, Raggi Ade. 2016. Collaborative Governance dalam Pembangunan Kawasan Pedesaan (Tinjauan Konsep dan Regulasi.). *Jurnal Pemerintahan, Politik dan Birokrasi* Volume II No 1 hlm 200-208
- [10] Sugiyono. 2007. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta